

ABSTRAK

Pentingnya dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan Pemilu sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam menyelenggarakan tujuan Pemilu. Tingkat kompetisi dan kontestasi antar calon eksekutif dan calon legislatif sangat besar. Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan politik antar calon berserta dan partai pendukungnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis: (1) bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, (2) mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, (3) kendala dalam proses hukum terhadap tindak pidana pemilu.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Disamping Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut dijelaskan berbagai bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang secara yuridis dijelaskan dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 553, (2) Mekanisme dalam proses peradilan pidana pemilu yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang mana proses dilaksanakan secara peradilan khusus yang masih mengacu pada tahapan proses peradilan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (3) Kendala yang terjadi dalam proses hukum terhadap tindak pidana pemilu dialami oleh berbagai perangkat yang terlibat dalam proses peradilan tindak pidana pemilu dengan kendala yang berbeda-beda tiap perangkat baik dari panwaslu, penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum Pidana.

ABSTRACT

The importance of criminal law enforcement on the implementation of elections as a last resort (*ultimum remedium*) in aligning the objectives of the election. The level of competition and contestation between executive candidates and legislative candidates is very large. This is due to the crystallization of political interests between the candidates along with their supporting parties.

This study aims to determine, and analyze: (1) the forms of election criminal acts occurring in Indonesia, (2) the mechanism of law enforcement for election criminal acts based on the Election Law, (3) obstacles in the legal process against election criminal acts .

The method used in this research is sociological juridical. The specifications of this study are descriptive analysis. The data source used is secondary data. Secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it can be concluded: (1) Aside from the Election Criminal Acts regulated in the Criminal Code Act, it is also regulated in more detail and force against election crimes in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The General Election Law explains various forms of election criminal acts which are legally explained from Article 488 to Article 553, (2) The mechanism in the election criminal justice process based on Law Number 7 of 2017 concerning Elections through investigation , investigations, prosecutions, and trials where the process is carried out in a special court which still refers to the stages of the general criminal justice process in the Criminal Procedure Code, (3) Constraints that occur in the legal process against election criminal acts experienced by various instruments that involved in the election criminal justice process with different constraints for each device from the election supervisory committee, police investigators, prosecutors, and courts.

Keywords: Law, General Election, Criminal Law Enforcement.